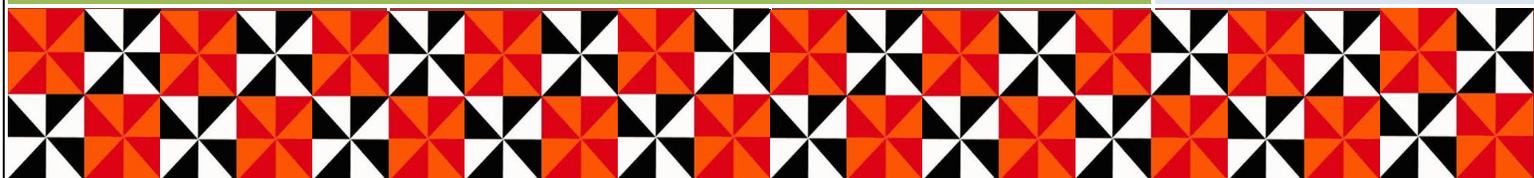




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2020



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Untuk menjawab sebuah hasil kinerja instansi pemerintah dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, tugas pokok, fungsi dan kinerja seluruh Dinas instansi pemerintah terus menerus dipantau oleh masyarakat sebagaimana terlihat dengan berkembangnya kritikan masyarakat terhadap pemerintah dalam menilai keberhasilannya melaksanakan pemerintahan yang baik berupa aparatur yang bersih, bebas KKN serta perlunya akuntabilitas publik pemerintah sebagai jawaban dari kengerjanya.

Dalam kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat perlu untuk melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga diharapkan dengan evaluasi yang dilakukan kita mampu melakukan evaluasi dan koreksi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan sekaligus memenuhi harapan masyarakat Lampung Barat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan

yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawab ini masih banyak yang perlu mendapat penyempurnaan-penyempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk sebuah kemajuan dan kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam kompleksitas dinamika kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, kita dituntut untuk mempersiapkan seluruh komponen bangsa agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan dan menghadapi berbagai tantangan yang timbul. Institusi Pemerintah sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan Negara memiliki posisi penting dalam mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu unsur pemerintah menghadapi permasalahan dan tantangan yang sama dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan refleksi dan proyeksi agar bisa mendominasi fungsi dan mengoptimalkan peran serta kontribusinya bagi pembangunan Bangsa baik jangka pendek maupun yang fundamental dan berjangka panjang.

Laporan ini dimaksudkan sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat tentang Arah Kebijakan Umum, Pengelolaan Keuangan, Penyelenggaraan tugas umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka

menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
17. Peraturan Bupati No 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Lampung Barat

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 VISI

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Barat merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih masa jabatan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT dan SEJAHTERA"

Dengan penjelasan sebagai berikut :

HEBAT : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa

SEJAHTERA : Merupakan Tujuan akhir tau keadaan yang diharapkan

Makna VISI : Masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai.

1.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan Infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawaskan lingkungan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya local.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan public, dan
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Maka Misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Pernyataan Misi ke 4 (Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil),
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik

2. DATA UMUM DAERAH

C.1 Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 3.368.14 km² setelah terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4°, 47',16"-5°, 56', 42" lintang selatan dan 103°, 35', 08" - 104°, 33', 51" bujur timur

Adapun batas wilayah Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatra Selatan)
- Sebelah Selatan : Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus
- Sebelah Barat : Ka. Pesisir Barat
- Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus

C.2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II tahun 2020, yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

Tabel I
Data Penduduk Kabupaten Lampung Barat
Berdasarkan Data DKB Semester II 2020
Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Balik Bukit	21.637	20.403	42,040
2	Sumber Jaya	12.631	11.926	24.557
3	Belalau	6.529	6.089	12.618
4	Way Tenong	17.967	17.177	35.144
5	Sekincau	9.943	9.157	19.100
6	Suoh	9.814	8.874	18.688
7	Batu Brak	7.908	7.289	15.197
8	Sukau	13.113	12.265	25.378
9	Gedung Surian	8.766	8.223	16.988
10	Kebun Tebu	10.679	10.173	20.852
11	Air Hitam	6.400	5.794	12.194
12	Pagar Dewa	9.265	8.237	17.502
13	Batu Ketulis	7.102	6.384	13.486
14	Lumbok Seminung	4.357	3.869	8.226
15	Bandar Negeri Suoh	13.400	11.819	25.219
	Jumlah	159.511	147.679	307.190

BAB II

PENJABARAN APBD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu lembaga teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan sesuai dengan target dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administasi perkantoran tepat waktu 100%	pelayanan administasi perkantoran tepat waktu 100%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk 500 surat, Jumlah Surat Keluar 500 surat	Jumlah Surat masuk 603 surat, Jumlah Surat Keluar 526 surat				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik 3 rekening, Jumlah rekening Telpon 1 rekening	Jumlah rekening listrik 3 rekening, Jumlah rekening Telpon 1 rekening				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 1 unit, Jumlah minibus yang dibayar pajaknya 3 unit	Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 1 unit, Jumlah minibus yang dibayar pajaknya 3 unit				
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek 2 buku, jumlah cetak rekening koran 20 kali	Jumlah buku cek 2 buku, jumlah cetak rekening koran 20 kali				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis peralatan kebersihan 17 jenis	jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis peralatan kebersihan 17 jenis				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK 32 jenis	Jumlah jenis ATK 32 jenis				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak 4 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis	Jumlah Jenis Cetak 4 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik 10 jenis	Jumlah jenis komponen listrik 10 jenis				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU, 4 SKHU	Jumlah SKHU, 4 SKHU				
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makan minum rapat 12 bulan, Jumlah Penyediaan makan minum tamu 12 bulan	Jumlah Penyediaan makan minum rapat 12 bulan, Jumlah Penyediaan makan minum tamu 12 bulan				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan				

			Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali, Jumlah bulan publikasi media masa 12 bulan	Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali, Jumlah bulan publikasi media masa 12 bulan			
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan			
			Biaya Operasional Kantor UPTD	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPTD, 12 bulan	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPTD, 12 bulan			
			Penyediaan jasa TV Berbayar, internet dan sandi	Jumlah bulan speedy yang dibayar 12 bulan	Jumlah bulan speedy yang dibayar 12 bulan			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%			
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah kursi 12 unit, Jumlah meja 3 unit	Jumlah kursi 12 unit, Jumlah meja 3 unit			
			Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Jumlah pengadaan laptop 1 unit	Jumlah pengadaan laptop 1 unit			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah motor yang dipelihara 1 unit, jumlah minibus yang dipelihara 3 unit	jumlah motor yang dipelihara 1 unit, jumlah minibus yang dipelihara 3 unit			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara 5 unit	jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara 5 unit			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang terpelihara 11 unit	jumlah peralatan kantor yang terpelihara 11 unit			
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%	Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 12 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 12 dokumen			
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan smester 2 dikumen	Jumlah dokumen laporan keuangan smester 2 dikumen			

			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran 2 dokumen	Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran 2 dokumen			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen			
			Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	jumlah dokumen laporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD 18 dokumen	jumlah dokumen laporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD 18 dokumen			
			Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparatur pengelolaan Keuangan OPD 18 orang	Jumlah aparatur pengelolaan Keuangan OPD 18 orang			
			Program pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			
				- persentase wajib KTP yang sudah rekam 93,66%	- persentase wajib KTP yang sudah rekam 96,04%			
				- Penerbitan KIA 60,29%	- Penerbitan KIA 67,99%			
			Penerapan Kartu Identitas Anak	jumlah Anak yang memiliki KIA, 54.900 KIA	jumlah Anak yang memiliki KIA, 60.929 KIA			
			Kegiatan pendataan penduduk pindah datang	jumlah penduduk pindah datang 5500 orang	jumlah penduduk pindah datang 9628 orang			
			Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah KK yang terbit 15.000 KK, Jumlah perekaman KTP-EL 5000 orang	Jumlah KK yang terbit 23.338 KK, Jumlah perekaman KTP-EL 5412 orang			Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Pemeliharaan dan pengembangan SIAK	jumlah Peralatan 1 unit, Jumlah Operator 54 orang	jumlah Peralatan 1 unit, Jumlah Operator 54 orang			
			DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan DAK Administrasi Kependudukan 100%	Persentase Pelaksanaan DAK Administrasi Kependudukan 100%			
			Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			
				- akta kelahiran 51%	- akta kelahiran 97,85%			

				- akta perkawinan 57%	- akta perkawinan 64,42%			
				- akta perceraian 100%	- akta perceraian 100%			
				- akta kematian 100%	- akta kematian 100%			
			Sosialisasi akta pencatatan sipil	Jumlah peserta sosialisasi 0 orang	Jumlah peserta sosialisasi orang	Terjadinya pandemi covid 19, mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami refofusing anggaran, kegiatan sosialisasi ini termasuk kegiatan yg mengalami refofusing anggaran		
			Pelayanan akta perkawinan non muslim di rumah ibadah	Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani 30 pasang	Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani 30 pasang			
			Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah masyarakat lampung barat yang membuat akta 1000 orang	Jumlah masyarakat lampung barat yang membuat akta 1000 orang			Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penurunan data ganda/anomali 0,43	Persentase Penurunan data ganda/anomali 0,43			
				Persentase Pekon Tertib administrasi Kependudukan 0	Persentase Pekon Tertib administrasi Kependudukan 0			
			Penyusunan informasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan 12 laporan	Jumlah laporan kependudukan 12 laporan			
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan yang dicetak atau disusun, 0 buku	Jumlah Laporan yang dicetak atau disusun, 0 buku	Terjadinya pandemi covid 19, mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami refofusing anggaran, kegiatan sosialisasi ini termasuk kegiatan yg mengalami refofusing anggaran		Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	jumlah buku profil yang dicetak 25 buku	jumlah buku profil yang dicetak 25 buku			
			Pembentukan Pekon Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	Jumlah Pekon GISA, 0 pekon	Jumlah Pekon GISA, 0 pekon	Terjadinya pandemi covid 19, mengakibatkan		

							beberapa kegiatan mengalami refofusing anggaran, kegiatan sosialisasi ini termasuk kegiatan yg mengalami refofusing anggaran		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS

Tidak ada kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2019 dapat di lihat dari tabel berikut :

TINDAK LANJUT CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD KAB. LAMPUNG BARAT

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2019	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Memaksimalkan pelayanan serta terus menjalin hubungan yang baik dengan aparat pekon sampai pemangku dalam pendataan kependudukan apakah bertambah berkurang tentunya dengan prinsip kebersamaan bukan atasan dengan bawahan. Sehingga dalam penggunaannya, data yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan baik	Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Program/kegiatan antara lain : 1. Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Program Pencatatan Sipil Kegiatan : Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan	Dengan adanya Program dan Kegiatan tersebut maka berdampak terhadap peningkatan pelayanan, pada program dan kegiatan tersebut terdapat pelayanan jemput bola ke Kecamatan, Pekon, Sekolah. hal tersebut dapat dilihat dengan tercapainya indikator indek kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan predikat A (melebihi target yang telah ditentukan yaitu Predikat C). Dan pada masa sebelum pandemi Covid 19, Dinas Kependudukan selalu mengadakan sosialisasi terkait administrasi kependudukan dengan melibatkan aparat kecamatan, aparat pekon dan pemangku.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. ADI UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640830 198403 1 001

BAB IV

PENJABARAN APBD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu lembaga teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tidak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan, hanya terdapat dana DAK Administrasi Kependudukan.

BAB V

P E N U T U P

1.1 Anggaran dan Realisasi

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 (enam) Program dan 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan, dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.051.971.060,-** (*Tiga milyar lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,92 % atau sebesar **Rp. 2.896.854.441,-** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Belanja Langsung			
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	529.799.860	507.068.466	95.71 %	22.731.394
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000	100%	0
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	19.800.000	14.544.367	73.46 %	5.255.633
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.250.000	3.022.775	71.12 %	1.227.225
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	575.000	295.000	51.30%	280.000
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.265.380	6.265.380	100%	0
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.457.000	25.457.000	100 %	0
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.451.500	23.444.300	99.97 %	7.200
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.869.000	4.869.000	100%	0

9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	3.960.000	100%	0
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000	8.000.000	100%	0
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85.390.000	76.775.512	89.91 %	8.614.488
12.	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	59.630.000	59.630.000	100%	0
13.	Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	24.220.000	24.077.800	99.41 %	142.200
14.	Biaya Operasional Kantor UPTD	236.151.980	231.746.277	98.13 %	4.405.703
15.	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	23.880.000	21.081.055	88.28 %	2.798.945
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.422.000	170.731.000	99.60 %	691.000
1.	Pengadaan Mebeleur	14.300.000	14.300.000	100 %	0
2.	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	10.000.000	9.309.000	93.09 %	691.000
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	111.382.000	111.382.000	100%	0
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30.700.000	30.700.000	100%	0
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.040.000	5.040.000	100 %	0
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	113.100.000	113.100.000	100%	0
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100 %	0
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.000.000	1.000.000	100%	0
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	100%	0
4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000	2.499.900	100%	0

5.	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	2.600.000	2.600.000	100%	0
6.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	104.000.000	104.000.000	100%	0
4.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.087.634.200	1.956.226.175	93.71 %	131.408.025
1.	Penerapan Kartu Identitas Anak	63.871.900	57.133.400	89.45 %	6.738.500
2.	Kegiatan Pendataan Penduduk Pindah Datang	8.452.000	8.452.000	100 %	0
3.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	29.481.000	29.481.000	100 %	0
4	Pemeliharaan dan Pengembangan SIAK	561.208.300	551.506.584	98,27 %	9.701.716
5.	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.424.621.000	1,309.653.191	91.93 %	114.967.809
5.	Program Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	83.661.000	83.590.300	99.92 %	70.700,-
1.	Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil	22.020.000	22.020.000	100 %	0
2.	Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim dirumah Ibadah	12.980.000	12.939.300	99.69 %	40.700
3.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	48.661.000	48.631.000	99.94 %	30.000
6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.354.000	66.138.500	99.68 %	215.500
1.	Penyusunan Informasi Kependudukan	26.346.000	26.134.000	99.20 %	212.000
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan	4.306.000	4.306.000	100 %	0
3.	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	25.655.000	25.651.500	99.99 %	3.500
4.	Pembentukan Pekon Gerakan Indonesia Sadar Adminduk	10.047.000	10.047.000	100 %	0

Didalam pelaksanaan program Kerja dan kegiatan ini kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu perbaikan baik penyusunan maupun data pendukung lainnya, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kebaikan dari program dan kegiatan ini dimasa yang mendatang.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. ADI UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640830 198403 1 001

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%	pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk 500 surat, Jumlah Surat Keluar 500 surat	Jumlah Surat masuk 500 surat, Jumlah Surat Keluar 500 surat			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik 3 rekening, Jumlah rekening Telpon 1 rekening	Jumlah rekening listrik 3 rekening, Jumlah rekening Telpon 1 rekening			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 1 unit, Jumlah mimbus yang dibayar pajaknya 3 unit	Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 1 unit, Jumlah mimbus yang dibayar pajaknya 3 unit			
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek 2 buku, jumlah cetak rekening koran 20 kali	Jumlah buku cek 2 buku, jumlah cetak rekening koran 20 kali			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis peralatan kebersihan 17 jenis	jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis peralatan kebersihan 17 jenis			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK 32 jenis	Jumlah jenis ATK 32 jenis			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan 4 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis	Jumlah Jenis Cetakan 4 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik 10 jenis	Jumlah jenis komponen listrik 10 jenis			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU, 4 SKHU	Jumlah SKHU, 4 SKHU			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makan minum rapat 12 bulan, Jumlah Penyediaan makan minum tamu 12 bulan	Jumlah Penyediaan makan minum rapat 12 bulan, Jumlah Penyediaan makan minum tamu 12 bulan			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan			
				Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali, Jumlah bulan publikasi media masa 12 bulan	Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali, Jumlah bulan publikasi media masa 12 bulan			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan			
				Biaya Operasional Kantor UPTD	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPTD, 12 bulan	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPTD, 12 bulan			
				Penyediaan jasa TV Berbayar, internet dan sandi	Jumlah bulan speedy yang dibayar 12 bulan	Jumlah bulan speedy yang dibayar 12 bulan			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%			
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah kursi 12 unit, Jumlah meja 3 unit	Jumlah kursi 12 unit, Jumlah meja 3 unit			
				Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Jumlah pengadaan laptop 1 unit	Jumlah pengadaan laptop 1 unit			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah motor yang dipelihara 1 unit, jumlah mimbus yang dipelihara 3 unit	jumlah motor yang dipelihara 1 unit, jumlah mimbus yang dipelihara 3 unit			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara 5 unit	jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara 5 unit			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang terpelihara 11 unit	jumlah peralatan kantor yang terpelihara 11 unit			
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%	Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%			
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 12 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 12 dokumen			
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan smester 2 dikumen	Jumlah dokumen laporan keuangan smester 2 dikumen			
				Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran 2 dokumen	Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran 2 dokumen			
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen			
				Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	jumlah dokumen laporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD 18 dokumen	jumlah dokumen laporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD 18 dokumen			
				Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparatur pengelolaan Keuangan OPD 18 orang	Jumlah aparatur pengelolaan Keuangan OPD 18 orang			

Program pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
	- persentase wajib KTP yang sudah rekam 93,66%	- persentase wajib KTP yang sudah rekam 96,04%
	- Penerbitan KIA 60,29%	- Penerbitan KIA 67,99%
Penerapan Kartu Identitas Anak	jumlah Anak yang memiliki KIA, 54.900 KIA	jumlah Anak yang memiliki KIA, 60.929 KIA
Kegiatan pendataan penduduk pindah datang	jumlah penduduk pindah datang 5500 orang	jumlah penduduk pindah datang 9628 orang
Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah KK yang terbit 15.000 KK, Jumlah perekaman KTP-EL 5000 orang	Jumlah KK yang terbit 23.338 KK, Jumlah perekaman KTP-EL 5412 orang
Pemeliharaan dan pengembangan SIAK	jumlah Peralatan 1 unit, Jumlah Operator 54 orang	jumlah Peralatan 1 unit, Jumlah Operator 54 orang
DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan DAK Administrasi Kependudukan 100%	Persentase Pelaksanaan DAK Administrasi Kependudukan 100%
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
	- akta kelahiran 51%	- akta kelahiran 97,85%
	- akta perkawinan 57%	- akta perkawinan 64,42%
	- akta peceeraian 100%	- akta peceeraian 100%
	- akta kematian 100%	- akta kematian 100%
Sosialisasi akta pencatatan sipil	Jumlah peserta sosialisasi 0 orang	Jumlah peserta sosialisasi 0 orang
Pelayanan akta perkawinan non muslim di rumah ibadah	Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani 30 pasang	Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani 30 pasang
Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah masyarakat lampung barat yang membuat akta 1000 orang	Jumlah masyarakat lampung barat yang membuat akta 1150 orang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penurunan data ganda/anomali 0,43	Persentase Penurunan data ganda/anomali 0,43
	Persentase Pekon Tertib administrasi Kependudukan 0	Persentase Pekon Tertib administrasi Kependudukan 0
Penyusunan informasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan 12 laporan	Jumlah laporan kependudukan 12 laporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan yang dicetak atau disusun, 0 buku	Jumlah Laporan yang dicetak atau disusun, 0 buku
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	jumlah buku profil yang dicetak 25 buku	jumlah buku profil yang dicetak 25 buku
Pembentukan Pekon Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	Jumlah Pekon GISA, 0 pekon	Jumlah Pekon GISA, 0 pekon

Terjadinya pandemi covid 19, mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami refofusing anggaran, kegiatan sosialisasi ini termasuk kegiatan yg mengalami refofusing anggaran

Terjadinya pandemi covid 19, mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami refofusing anggaran, kegiatan sosialisasi ini termasuk kegiatan yg mengalami refofusing anggaran

Terjadinya pandemi covid 19, mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami refofusing anggaran, kegiatan sosialisasi ini termasuk kegiatan yg mengalami refofusing anggaran

Tindak Lanjut
Rekomendasi DPRD

Tindak Lanjut
Rekomendasi DPRD

Tindak Lanjut
Rekomendasi DPRD

TINDAK LANJUT

NO	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2019
1	<p>Memaksimalkan pelayanan serta terus menjalin hubungan yang baik dengan aparat pekon sampai pemangku dalam pendataan kependudukan apakah bertambah berkurang tentunya dengan prinsip kebersamaan bukan atasan dengan bawahan. Sehingga dalam penggunaannya, data yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan baik</p>

JT CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD KAB. LAMPUNG BARAT

TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
<p>Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Program/kegiatan antara lain :</p> <p>1. Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Program Pencatatan Sipil Kegiatan : Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil</p> <p>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan</p>	<p>Dengan adanya Program dan Kegiatan tersebut maka berdampak terhadap peningkatan pelayanan, pada program dan kegiatan tersebut terdapat pelayanan jemput bola ke Kecamatan, Pekon, Sekolah. hal tersebut dapat dilihat dengan tercapainya indikator indek kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan predikat A (melebihi target yang telah ditentukan yaitu Perdikat C). Dan pada masa sebelum pandemi Covid 19, Dinas Kependudukan selalu mengadakan sosialisasi terkait administrasi kependudukan dengan melibatkan aparat kecamatan, aparat pekon dan pemangku.</p>